



9 772088 235001

STRATEGI PERCEPATAN AKSES INTERNET DI INDONESIA

Ahmad Budiman*

Abstrak

Kecepatan akses internet Indonesia menduduki peringkat terbawah di antara negara-negara ASEAN. Kecepatan akses internet Indonesia yang saat ini 41,24 Mbps perlu ditingkatkan hingga 100 Mbps. Tulisan ini mengkaji strategi percepatan akses internet di Indonesia berikut dampak positif yang akan diperoleh dari kebijakan percepatan tersebut. Pemerintah telah meluncurkan Program Kampung Internet 2025 untuk memperluas akses internet di 1.194 titik penerima manfaat. Pemerataan dan program khusus dilakukan dengan menyediakan akses internet tetap hingga 100 Mbps di wilayah tanpa jaringan serat optik. Pemanfaatan Satelit Republik Indonesia (Satria)-1 di daerah 3T mampu memberikan kecepatan hingga 3 sampai 4 Mbps. Cakupan jaringan 5G akan diperluas dengan mempersiapkan band 700 MHz, 1,4 GHz, 2,6 GHZ dan 26 GHZ. Panja Komisi I DPR tentang Pengawasan Percepatan Akses Internet di Indonesia dapat melakukan identifikasi masalah aktual terkait lambatnya akses internet di Indonesia dan memutuskan kebijakan strategi yang perlu dilakukan pemerintah, serta skala prioritas percepatan akses internet di Indonesia.

Pendahuluan

Komisi I DPR pada rapat internal Komisi I DPR tanggal 19 September 2025 memutuskan salah satunya membentuk Panja Pengawasan Percepatan Akses Internet di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan pendalaman masalah atas kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terkait kecepatan akses internet, pemerataan akses internet terutama di daerah blankspot, serta update mengenai program 5G (Sekretariat Komisi I, 2025).

Kecepatan internet Indonesia menurut laporan terbaru *Speedtest Global Index* untuk bulan Juni 2025, untuk kategori *mobile* menempati posisi ke-87 dari 103 negara di dunia yaitu 41,24 Mbps. Bahkan, di Asia Tenggara saja Indonesia belum keluar dari urutan terendah dimana Brunei Darussalam dengan 185,54 Mbps, Singapura dengan 159,10 Mbps, dan Malaysia dengan 156,55 Mbps menempati urutan pertama hingga urutan ketiga di ASEAN.

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: ahmad.budiman@dpr.go.id.

Hal yang sama juga terjadi pada Internet *Fixed Broadband* per Juni 2025 dengan kekuatan 35,96 Mbps (Haryanto, 2025b).

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid menjelaskan pembangunan konektivitas digital Indonesia telah menjangkau 80,8 persen populasi (Biro Humas Kemkomdigi, 2025c). Kemkomdigi telah menargetkan 1.194 titik penerima manfaat yang akan dibangun di lima provinsi (Biro Humas Kemkomdigi, 2025a). Pakar telekomunikasi dari ICT Institute, Heru Sutadi, menilai sudah seharusnya Indonesia menargetkan layanan *broadband* yang lebih baik, hingga tembus 100 Mbps (Haryanto, 2025c). Oleh karena itu, tulisan ini memberikan masukan kepada Panja Komisi I DPR terkait strategi percepatan akses internet berikut dampak positif yang akan diperoleh dari kebijakan percepatan tersebut.

Strategi Percepatan Akses Internet

Meskipun pemerintah telah menjalankan strategi percepatan akses internet, namun kebijakan tersebut masih harus ditingkatkan. Pemerintah perlu menetapkan dan melaksanakan kebijakan prioritas selain dari kebijakan yang telah dijalankan selama ini. Strategi percepatan akses internet juga perlu diikuti dengan percepatan kebijakan terkait perluasan infrastruktur digital, pemerataan dan program khusus, ketersediaan akses internet di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), dan pemanfaatan dan optimasi pita frekuensi untuk 5G.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Infrastruktur Digital Kemkomdigi, fokus terhadap pemerataan akses internet, serta memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Menurut Menteri Komdigi, penguatan infrastruktur digital juga sejalan dengan program prioritas Kemkomdigi yang salah satunya yaitu pengembangan infrastruktur digital, untuk memastikan konektivitas merata di seluruh penjuru Indonesia (Wandi, 2025).

Pemerataan dan program khusus dilakukan oleh Pemerintah dengan menginstruksikan operator seluler untuk menyediakan akses internet tetap hingga 100 Mbps di wilayah tanpa jaringan serat optik, termasuk sekolah, puskesmas, dan kantor desa. Menurut data dari Ditjen Infrastruktur Digital Kemkomdigi sebanyak 86 persen sekolah (190.000 unit) masih belum mempunyai akses internet tetap. Selain itu, 75 persen Puskesmas (7.800 unit) belum terkoneksi dengan baik, 32.000 kantor desa masih berada dalam zona *blankspot*, dan penetrasi *fixed broadband* baru menjangkau 21,31 persen rumah tangga di Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan spektrum baru yang akan dialokasikan secara transparan kepada operator seluler nasional. Model jaringan yang akan diterapkan bersifat *open access*, artinya pemegang izin wajib membuka infrastrukturnya untuk digunakan bersama oleh penyelenggara lain (Biro Humas Kekmkomdigi, 2025b).

Percepatan juga perlu dilakukan dengan meningkatkan jumlah sebaran pemancar *Base Transceiver Station* (BTS) yang berfungsi mengirim dan menerima sinyal radio ke

perangkat komunikasi, seperti telepon rumah, telepon seluler, dan gawai pintar, di seluruh Indonesia. Hal ini untuk menjamin pemenuhan kebutuhan percepatan akses internet bagi masyarakat. Walaupun harus diakui masih ada lima provinsi yang memiliki pemancar BTS paling sedikit, yaitu Maluku Utara 1.715 pemancar, Papua Barat 2.124 pemancar, Kalimantan Utara 2.311 pemancar, Sulawesi Barat 2.523 pemancar, dan Maluku 2.725 pemancar (Komdigi, 2025).

Percepatan akses internet di Indonesia juga perlu ditingkatkan dengan mempercepat kebijakan yang telah ada. Kemkomdigi dalam mewujudkan ketersediaan akses internet di Indonesia di daerah 3T, memanfaatkan layanan dari satelit Republik Indonesia (Satria)-1 atau dikenal dengan 'tol langit'. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemkomdigi perlu terus berusaha meningkatkan penyediaan titik-titik vital layanan internet seperti layanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan pertahanan di daerah 3T.

Pemerintah akan mengoptimalkan layanan 5G di banyak daerah. Data Komdigi menjelaskan cakupan sinyal 5G di Indonesia baru 4,44% sejak diperkenalkan ke publik empat tahun lalu. Hal ini yang akan difokuskan Komdigi untuk ditingkatkan lagi cakupan jaringan 5G di tanah Air. Ada empat pita frekuensi yang dipersiapkan oleh Komdigi untuk di tahun 2025, yaitu di antaranya band 700 MHz, 1,4 GHz, 2,6 GHz, dan 26 GHz. Untuk diketahui, dibutuhkan alokasi lebar pita 100 MHz untuk mendapatkan pengalaman koneksi internet cepat 5G (Haryanto, 2025a).

Dampak Positif Kebijakan

Percepatan akses internet memiliki dampak positif, utamanya bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sebagaimana terjadi dengan penyebaran jaringan 5G dan dampaknya bagi ekonomi di Singapura. Data OpenSignal pada tahun 2024 menyebutkan bahwa tingkat 5G *Availability* di Indonesia baru 1,5% dengan skor 5G *Coverage Experience* 0,1, sedangkan Singapura mencapai 35,9% dengan skor 5G *Coverage Experience* 9,0. Kementerian Pembangunan dan Informasi Digital Singapura, menjelaskan kontribusi ekonomi digital sebesar \$106 miliar atau 17% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Singapura pada tahun 2022, meningkat dari 13% pada tahun 2017. Hal ini menandai bahwa jaringan internet cepat telah mendukung pertumbuhan ekonomi Singapura (Fauzi, 2025).

Dampak positif dari penggunaan jaringan 5G yaitu monetisasi yang dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha. Keuntungan yang didapat pelaku usaha, tidak hanya soal kecepatan jaringan tetapi juga mengoptimalkan operasional, mengurangi biaya, serta meningkatkan efisiensi. Dampak positif ini tentunya perlu dukungan oleh penyedia layanan dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur jaringan, serta pemerintah dalam menetapkan kebijakan percepatan ketersediaan spektrum.

Konektivitas internet dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan meningkatkan inklusi sosial dan memperluas akses terhadap layanan penting. Di banyak negara berkembang, akses ke layanan perbankan tradisional terbatas, terutama di daerah pedesaan. Dengan adanya layanan keuangan digital yang didukung oleh internet, seperti mobile banking dan dompet digital, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan kini dapat mengakses kredit, menabung, dan bertransaksi secara aman. Konektivitas internet juga akan memperluas akses ke layanan kesehatan, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan. Melalui *platform telemedicine* dan *remote patient monitoring* memungkinkan pasien di daerah terpencil untuk mendapatkan perawatan medis dari dokter spesialis tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Ini meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan kesehatan antar wilayah (datalake.id, 2025).

Strategi percepatan akses internet di Indonesia memiliki hubungan yang erat dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi digital serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Akses internet yang merata dan cepat memungkinkan pelaku usaha, terutama UMKM, untuk mengadopsi *platform* digital dalam kegiatan ekonomi, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional. Di sisi lain, digitalisasi layanan publik seperti administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama di daerah terpencil, sehingga meningkatkan inklusi sosial dan efisiensi birokrasi. Dengan demikian, percepatan akses internet bukan hanya menjadi fondasi infrastruktur digital nasional, tetapi juga motor penggerak utama transformasi ekonomi dan reformasi pelayanan publik secara menyeluruh.

Penutup

Kecepatan internet Indonesia masih pada peringkat bawah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Sudah seharusnya Indonesia menargetkan layanan broadband yang lebih baik, apalagi bila dikaitkan dengan rencana meningkatkan kecepatan internet Indonesia hingga 100 Mbps. Strategi yang dilakukan Pemerintah dengan meluncurkan Program Kampung Internet dengan menambah jaringan kabel fiber optik di beberapa tempat yang diprioritaskan. Strategi lainnya yaitu perluasan infrastruktur digital, pemerataan dan program khusus, ketersediaan akses internet di Indonesia di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), dan pemanfaatan dan optimasi pita frekuensi untuk 5G. Kesemua strategi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi berbasis digital di Indonesia.

Panja Komisi I DPR tentang Pengawasan Percepatan Akses Internet di Indonesia perlu melakukan pendalaman masalah terhadap masih lambatnya akses internet di Indonesia dan mengawasi strategi percepatan akses internet di Indonesia. Selain itu Panja Komisi I DPR dapat meminta Pemerintah untuk terus mengoptimalkan dampak positif penggunaan internet bagi semua bidang kehidupan di tanah air.

Referensi

- Biro Humas Kemkomdigi. (2025a, September 29). Siaran Pers, Internet Masuk Desa: Kemkomdigi Sediakan 1.194 Titik Akses Broadband Kampung Internet. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/internet-masuk-desa-kemkomdigi-sediakan-1194-titik-akses-broadband-kampung-internet>.
- Biro Humas Kemkomdigi. (2025b, Juni 12). Siaran Pers, Pemerintah Siapkan Internet 100 Mbps untuk Sekolah dan Puskesmas Blank Spot. <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9398>.
- Biro Humas Kemkomdigi. (2025c, September 24). Siaran Pers, 24 Tahun Kemkomdigi, Dari WTP hingga Konektivitas 80,8 Persen. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/24-tahun-kemkomdigi-dari-wtp-hingga-konektivitas-808-persen>.
- Fauzi, M. P. (2025, Maret 24). Ternyata 5G Bisa Genjot Ekonomi Digital Negara, Simak Penjelasan Ini! <https://inet.detik.com/telecommunication/d-7838411/ternyata-5g-bisa-genjot-ekonomi-digital-negara-simak-penjelasan-ini>.
- Haryanto, A. T. (2025a, Juni 4). Biar Internet RI Makin Kencang, Infrastruktur Jaringan 5G Bakal Diperluas. <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-7996476/biar-internet-ri-makin-kencang-infrastruktur-jaringan-5g-bakal-diperluas>
- Haryanto, A. T. (2025b, Agustus 3). Bukti Kecepatan Internet Indonesia Bobrok di Asia Tenggara, https://inet.detik.com/telecommunication/d-8042517/bukti-kecepatan-internet-indonesia-bobrok-di-asia-tenggara#google_vignette.
- Haryanto, A. T. (2024c, Juni 24). Menanti Indonesia Punya Internet Super Ngebut 100 Mbps Kapan? <https://inet.detik.com/telecommunication/d-7979958/menanti-indonesia-punya-internet-super-ngebut-100-mbps-kapan>.
- Hubungan Antara Konektivitas Internet dan Tingkat Pembangunan Nasional (2025). <https://datalake.id/hubungan-antara-konektivitas-internet-dan-tingkat-pembangunan-nasional/>.
- Pembangunan BTS di Indonesia. (2025, Juni 2). <https://data.komdigi.go.id/article/pembangunan-bts-di-indonesia>
- Sekretariat Komisi I DPR RI, 2025, Laporan Singkat Rapat Intern Komisi I 19 September 2025.
- Wandi. (2025, September 16). Kemkomdigi Tetapkan Pagu Anggaran 2026 Rp 8 Triliun, Fokus Infrastruktur Digital dan Pengawasan Ruang Siber. <https://indonesia.go.id/kategori/ekonomi-bisnis/10068/kemkomdigi-tetapkan-pagu-anggaran-2026-rp8-triliun-fokus-infrastruktur-digital-dan-pengawasan-ruang-siber?lang=1>.

